



**STRATEGI PENYIAPAN PASUKAN SIAGA OPERASI (STANDBY FORCE)
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TUGAS OPERASI
PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA**

**STRATEGY FOR STANDBY FORCE READINESS OF THE INDONESIAN
NATIONAL ARMY IN THE TASK OF PEACEKEEPING OPERATIONS**

Daniel Sergious Pasaroan, Rizerius Eko Hadisancoko, Budi Santoso
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
danielsp@idu.ac.id

***Abstract** – Internal and external changing in policies on global peacekeeping missions creates problems for the preparation of standby forces, especially in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the obstacles in realizing the strategy of preparing the TNI's standby force in supporting the peacekeeping operations and analyzing the strategies carried out by the TNI in preparing the standby force through pre-deployment training. The research was conducted using a descriptive qualitative method. The results of the research related to obstacles in realizing the strategy of preparing the TNI's standby force in supporting peacekeeping operations include budget constraints from internal and external sources, unoptimized facilities and infrastructure, limited personnel capabilities and shifting the place where pre-deployment training is carried out which was originally at PMPP TNI transferred to the main body unit that will depart for duty, limited personnel capabilities also hamper the implementation of the TNI's main tasks. Strategy as part of the ways with pre-deployment training to improve means, namely the ability of personnel to standby operations and policies and rules from the UN, for ends is the mission of maintaining for world peace according to the UN mandate in line with the realization of Indonesia's national interests to participate in maintaining world peace.*

Keywords: *peacekeeping operations, preparation, strategy, troops*

Abstrak – Perubahan internal dan eksternal dari kebijakan terkait misi pemeliharaan perdamaian dunia menimbulkan permasalahan tersendiri untuk penyiapan pasukan siaga operasi terutama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kendala dalam mewujudkan strategi penyiapan pasukan siaga operasi (standby force) TNI dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian dunia dan menganalisis strategi yang dilakukan TNI dalam penyiapan pasukan siaga operasi (*standby force*) melalui pre-deployment training. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian terkait kendala dalam mewujudkan strategi penyiapan pasukan siaga operasi (standby force) TNI dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian dunia antara lain adanya keterbatasan anggaran dari internal dan eksternal, ketidakefektifan sarana dan prasarana, keterbatasan kemampuan personel serta pergeseran tempat pre deployment training dilaksanakan yang semula di PMPP TNI dialihkan ke kotama satuan *main body* yang akan berangkat tugas, kemampuan personel yang terbatas juga menghambat pelaksanaan tugas



pokok TNI. Strategi sebagai bagian dari ways dengan *pre deployment training* untuk meningkatkan means yaitu kemampuan personel pasukan siaga operasi dan kebijakan dan aturan dari PBB, untuk ends adalah misi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai mandat PBB sejalan dengan perwujudan kepentingan nasional Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dunia.

Kata Kunci: operasi pemeliharaan perdamaian dunia, penyiapan, pasukan, strategi,

1. Pendahuluan

Keberhasilan Kontingen Garuda dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian menimbulkan kepercayaan dunia Internasional sehingga kontribusi Indonesia untuk berpartisipasi dan mengirim kontingennya menjadi harapan dalam misi perdamaian dunia. Hal ini menurut UU RI No 34 Tahun 2004 pasal 5 TNI memiliki peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara disesuaikan dengan kepentingan nasional. Panglima TNI mendukung dengan membentuk suatu badan tersendiri yang khusus menangani operasi pemeliharaan perdamaian dunia yang dinamakan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) melalui Kep Panglima TNI No: Kep/4/I/2007 dan No: Kep/5/I/2007 tanggal 29 Januari 2007. Upaya-upaya yang dilakukan PMPP TNI dalam menyiapkan prajurit TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian untuk PBB, antara lain dengan pengiriman-pengiriman personel dalam bentuk kontingen, *military observer* dan *military staff*.

Dalam periode awal hingga sekarang ini, pelibatan TNI dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) PBB masih memiliki hambatan dalam pelaksanaan misi. Hal ini didukung berdasarkan hasil temuan penelitian terdahulu dari beberapa dokumen di PMPP TNI dimana Satgas Indonesia mengalami beberapa hal menonjol yang menggambarkan kurang optimalnya pembangunan kapabilitas pasukan perdamaian PBB, yang dapat dilihat dari kondisi materiil Satgas, kemampuan personel dan kesiapan operasi di lapangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya juga masih ditemukan beberapa kendala mendasar seperti minimnya kemampuan berkomunikasi personel Satgas dalam bahasa Prancis.



Keterbatasan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Perancis seringkali menjadi kendala bagi Satgas dihadapkan pada tuntutan tugas dimana bahasa Perancis merupakan bahasa kedua penduduk lokal di daerah misi. Sumber : (*Laporan Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-F/MINUSCA di Republik Afrika Tengah, 2020*)

Dari sisi lain penyiapan pasukan siaga operasi (*Standby Force*) untuk *OPPD* juga mengalami kendala dengan adanya perubahan kebijakan yang merupakan proses pengambilan keputusan kepemimpinan yaitu bahwa penyelenggaraan latihan penyiapan yang semula dilaksanakan di PMPP TNI menjadi dilaksanakan di Kotama atau tempat satuan *main body* berlokasi. Seperti misalnya pelaksanaan *Training of Trainers Satgas Standby Force United Nation Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS)* di Yon Zipur 17/AD Kodam VI/Mulawarman TA 2020, *Training Of Trainers Yonif 731/Kabaresi Kodam XVI/Pattimura TA.2020*, bertempat di Mako Yonif 731/Kabaresi sebagai bagian dari MTT (Tim Pelatihan Seluler) untuk persiapan menunggu pelaksanaan tugas sesuai dengan jadwal penyelenggaraan. Hal ini menimbulkan berbagai kendala bagi para penyelenggara Latihan di lapangan, padahal PMPP TNI telah disiapkan untuk menggelar latihan berkaliber *OPPD* dengan segala perangkat dan fasilitas yang dimilikinya. PMPP TNI adalah Lembaga yang sudah ditunjuk untuk menyelenggarakan Latihan Pratugas/ Pre Deployment Training bagi personel yang akan melaksanakan *OPPD*.

Menjaga tatanan kehidupan antar Negara dari ancaman konflik, adalah tujuan untuk menjaga perdamaian dunia.(Halkis 2020). Strategi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations (UN)*, salah satunya dengan menggunakan *military powers*. Dikenal dengan Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (*OPPD*) atau *United Nations Peacekeeping Operation (UN PKO)*. (Widodo, 2018) untuk membantu memonitor proses perdamaian dan membantu pihak yang berkonflik melaksanakan kesepakatan damai yang dicapai, serta menjaga wilayah pasca konflik.

Fokus penelitian disesuaikan dengan penelitian program studi strategi kampanye militer yaitu pada penyiapan pasukan siaga operasi dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Sub fokus penelitian yaitu strategi yang dilakukan



untuk penyiapan pasukan siaga operasi (*Standby Force*) dari Tentara Nasional Indonesia yang akan melaksanakan tugas pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia melalui *Pre Deployment Training* atau latihan pratugas.

Pada bagian awal pendahuluan sampaikan keadaan dan latar belakang dari permasalahan yang dibahas serta fenomena yang ada. Hindari menyampaikan hasil penelitian. Tujuan penelitian menganalisis kendala dalam mewujudkan strategi penyiapan pasukan siaga operasi (*standby force*) TNI dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian dunia dan menganalisis strategi yang dilakukan TNI dalam penyiapan pasukan siaga operasi (*Standby Force*) melalui *Pre Deployment Training*.

Penelitian ini menggunakan teori strategi untuk menganalisis pelaksanaan dalam penyiapan pasukan siaga operasi. rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan sarana prasarana (*means*) yang digunakan. Landasan teori dengan penggunaan sumber daya manusia, personel merupakan bagian dari sumber daya manusia.

Menurut Ramsbotham (2006:217) *peace keeping* sebuah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral, konsep *peacekeeping* ini melibatkan aparat keamanan dan militer untuk meredam konflik dan menghindarkan perluasan konflik.

Pre Deployment Training merupakan Pelatihan pemeliharaan perdamaian yang umum, terspesialisasi dan sesuai khusus misi yang didasarkan pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berlangsung sebelum penempatan sebenarnya ke misi PBB.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan *Phenomenological Research* dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pelaksanaan *Pre-Deployment Training* yang dilaksanakan oleh PMPP TNI dalam melatih personel *peacekeeper* untuk



memberikan gambaran tentang penyiapan pasukan siaga operasi (*Standby Force*) TNI dalam *OPPD* guna kepentingan Nasional Indonesia.

Objek penelitian dalam tulisan ini penyiapan pasukan siaga operasi (*Standby Force*) TNI dalam mendukung operasi misi pemeliharaan perdamaian dunia guna pelaksanaan tugas TNI yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

Pada bagian ini, penulis menjelaskan langkah-langkah pada saat dilakukannya penelitian. Metode penelitian yang digunakan disampaikan secara mendetail untuk memungkinkan pembaca mengevaluasi metode, reliabilitas, dan validitas dari temuan penelitian. Disarankan metode penelitian disampaikan secara lugas dan padat.

Dalam mengumpulkan data didukung dengan observasi, wawancara dan dokumentasi didukung data primer dan sekunder. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dan tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan baru yang sebelumnya belum ada. Baik berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih diragukan sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Penarikan simpulan dihasilkan dalam bentuk teks yang naratif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pasukan Siaga Operasi (*Standby Force*) TNI yang akan melaksanakan Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (*OPPD*). Sesuai dengan Peraturan Panglima TNI (Perpang) TNI Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penugasan Prajurit TNI pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia dijelaskan ada 12 macam penugasan yang dilaksanakan oleh Pasukan Siaga Operasi TNI yang dimaksud yaitu *Mechanized Battalion (Mechbatt)*, *Composite Battalion (Combatt)*, *Engineering Company (Engcoy)*, *Reinforced Engineering Company (Rein Engcoy)*, *Force Headquarter Support Unit (FHQSU)*, *Force Protection Company (FPU)*, *Military Police Unit (MPU)*, *Military Community Outreach Unit (MCOU)*, *Civil-Military Coordination (CIMIC)*, *Medical Unit (Medic)*, *Naval*



Component (NC) dan Air Component (AC). Dari 12 macam penugasan tersebut, Indonesia telah memenuhi 10 macam penugasan.

CPTM dirancang oleh PBB yang menjadi panduan wajib bagi calon *Peacekeepers* dalam menyiapkan dirinya untuk mengemban misi di daerah konflik melalui UN-*DPKO (United Nation-Department of Peacekeeping Operation)* yang terdiri dari materi pokok dan materi pendukung yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan. Untuk pembagian waktu yang diberikan terdiri dari 3 (tiga) minggu untuk materi teori dan 1 minggu untuk materi praktek lapangan dalam bentuk latihan aplikasi yang dihadapkan pada persoalan yang akan dihadapi nantinya.

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) resmi didirikan dengan tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan dan penyiapan personel TNI dalam penugasan, pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan perdamaian PBB, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau (PMPP TNI) adalah satuan yang berada di bawah kendali Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang diperuntukan bagi calon Pasukan Perdamaian Indonesia, alias Kontingen Garuda yang akan bertugas ke luar negeri.

Penyiapan Pasukan Siaga Operasi (*Standby Force*) TNI dalam melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia adalah terkait dengan personel dan material yaitu strategi dengan memberikan dukungan anggaran yang tentunya bersumber dari APBN. Khususnya untuk penyiapan misi baru membutuhkan anggaran yang sangat besar terkait pengadaan material satgas sementara dalam penyiapan tersebut menurut aturan terbaru dari PBB tentang pengiriman personel yaitu UNPCRS bahwa belum tentu negara yang telah sesuai standar PBB akan diberangkatkan. Hal tersebut menjadi kendala bagi penyiapan pasukan siaga operasi karena membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) RI untuk menggelontorkan anggaran yang bersumber dari APBN.

Strategi kita masih terhambat dalam menyiapkan pasukan, karena diperlukan adanya pemahaman pada populasi lokal melalui peningkatan pemahaman budaya



lokal, agama, adat istiadat dan cara hidup. Pendekatan humanis dan pendekatan gender seperti memfasilitasi pelaksanaan kebijakan keamanan baru yang responsif sangat dibutuhkan guna mengakomodir kebutuhan dan masalah, namun disini kita perlu terus beradaptasi dan memang masih menjadi hambatan bagi pasukan di Negara penugasan Personel yang diberangkatkan ke daerah misi seharusnya memiliki kemampuan teknologi dan informasi karena manajemen administrasi MONUSCO, UNIFIL dan MPP PBB lainnya menggunakan sistem surat menyurat melalui Email (*Microsoft Outlook*) sehingga asas kecepatan dan ketepatan administrasi menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi.

Hambatan kita dalam penyiapan pasukan siaga operasi yaitu permasalahan terhadap pengurangan kuantitas pengiriman pasukan perdamaian. Disesuaikan dengan rencana dari Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri tentang melaksanakan co-deployment dalam peacekeeping operation untuk PBB. turunnya jumlah anggaran pemeliharaan perdamaian PBB dari berbagai negara donor untuk membiayai pengiriman pasukan.

Strategi yang kita lakukan untuk penyiapan pasukan dengan pelaksanaan *PDT* yang semula terpusat di PMPP menjadi tersebar di Kotama menyulitkan bagi PMPP maupun Kotama terkait dengan dukungan pelatih, sarana dan prasarana serta fasilitas Latihan yang ada di Kotama tersebut. Waktu pelaksanaan *PDT* diselenggarakan selama 30 hari dengan materi. Dukungan anggaran *PDT* bagi satuan bawah yang melaksanakan *PDT* pun terbatas sehingga menjadi kendala bagi penyelenggara Latihan. Tersebarnya pelaksanaan *PDT* di Kotama akan berdampak pada kualitas yang tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan penyelenggara masing-masing dan kapabilitas ini akan berdampak pada profesionalisme *peacekeepers* Indonesia.

hambatan dalam penyiapan pasukan siaga operasi yaitu dari sisi sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan tugas operasi seperti keterbatasan kemampuan *tracking* terhadap kegiatan patroli maupun jaga OP sebagai bentuk pengecekan operasional anggota di lapangan, dimana untuk laporan PMRT (*Patrol Mapping and*



Reporting Tool) masih dilakukan secara manual. Kemampuan Tim Patroli dalam orientasi peta pada awal kedatangan di daerah misi masih sering keliru sehingga keluar dari *route* patroli seperti beberapa kejadian yang pernah terjadi di penugasan UNIFIL. Masih banyak personel yang jabatan dalam penugasan tidak sesuai dengan kemampuan atau spesialisasi yang dimiliki.

Kurangnya kemampuan personel Satgas untuk berkomunikasi dalam Bahasa asing (Inggris) menghambat kelancaran koordinasi dengan *Sector East* dan *Unifil HQ* terkait tugas-tugas yang harus dikerjakan.

Dengan alokasi waktu *PDT* selama 1 bulan rasanya sulit untuk mengerti apalagi menguasai materi-materi CPTM tersebut, beberapa mungkin masih bisa karena hanya memerlukan penalaran namun yang bersifat praktek harus dilaksanakan berulang-ulang sehingga terbiasa dan akhirnya menguasai dan mahir melakukannya. Alokasi waktu 1 bulan *PDT* sangat kurang apalagi dihadapkan pada para Perwira/Pimpinan yang juga disibukkan untuk melengkapi berbagai kesiapan Satgas sehingga terkadang tidak fokus mengikuti proses pembelajaran.

Strategi Yang Dilakukan TNI Dalam Penyiapan Pasukan Siaga Operasi (*Standby Force*) Melalui *Pre Deployment Training*

Kontingen Garuda/UNIFIL TNI mengimplementasikan pembinaan wilayah pertahanan. Pembinaan wilayah pertahanan hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan serta penguasaan kondisi geografis maupun kondisi sosial, ekonomi dan kultural dari wilayah yang menjadi tanggung jawab Kontingen Garuda.

Pada operasi, pasukan disesuaikan yaitu sebagai Pengamat misi diantaranya pasukan yang tidak dipersenjatai dan warga sipil yang mengamati serta memonitori persetujuan gencatan senjata, sedangkan Pasukan perdamaian merupakan Pasukan yang dipersenjatai lengkap yang terdiri dari kontingen infanteri, kavaleri (pasukan tank dan kuda) dan medis. Untuk strategi latihan pada *main body* yaitu antara lain kemampuan *green material* dan *blue material*.



Untuk peran militer, leading sector untuk pengembangannya adalah Mabes TNI dengan PMPP. Penyiapan personil militer yang akan bertugas untuk PKO juga merupakan upaya Pemerintah RI mengatasi tantangan yang dihadapi UN PKO pada umumnya guna mewujudkan pembangunan kapasitas yang berdampak terhadap implementasi PKO pada masa depan. Strategi yang kita lakukan yaitu contohnya pada proses recruitment (seleksi)

Para pelatih (*Trainers*) sebelum memberikan pelatihan *Pre Deployment Training* kepada peserta pelatihan juga telah dibekali dan diberikan berbagai kursus dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan badan PBB yang berkaitan dengan perdamaian dunia yang dilaksanakan oleh badan PBB seperti UN-*Civil Military Course* (UN-CIMIC Course), *Train the Trainers for UN Peacekeepers* (T-3 Course), UN-*Logistic Peacekeepers Operation Course* dan lain sebagainya. Selain itu, para pelatih/*Trainers* yang terlibat dalam *Pre Deployment Training* adalah para personel yang minimal pernah satu kali melaksanakan misi PBB.

Strategi awal yang dilakukan tentu dalam penyiapan *Standby Force* sudah melakukan seleksi dan dipilih yang sesuai dengan kualifikasi Mabes TNI dan PMPP TNI.

PMPP TNI juga memberikan materi-materi yang bersifat teknis seperti cara berpatroli, cara bernegosiasi, cara melaksanakan prosedur yang sesuai standar internasional baik dalam pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun aplikasi di lapangan serta pemberian materi-materi yang bersifat pembekalan melalui ceramah yang diberikan oleh pejabat TNI maupun oleh pakar atau praktisi dari instansi terkait yang mendukung penugasan pada misi pemeliharaan perdamaian.

Dalam mendukung strategi penyiapan pasukan siaga operasi dalam *Pre Deployment Training* disesuaikan dengan kualifikasi PBB yaitu untuk mendukung keberhasilan operasi *peacekeeping*, terdiri dari beberapa faktor antara lain:

- a. Kepekaan tertinggi terhadap penduduk lokal dan menjunjung tinggi standar profesionalisme dan perilaku yang baik (penjaga perdamaian harus menghindari menjadi bagian dari masalah).



- b. Komitmen dari para pihak yang terlibat dalam proses politik untuk mengupayakan perdamaian.
- c. Amanat yang jelas, kredibel dan dapat dicapai, dengan personel yang sesuai sumber daya logistik dan keuangan.
- d. Kesatuan tujuan dalam Dewan Keamanan, dengan dukungan aktif untuk operasi PBB di lapangan.
- e. Komitmen dari negara tuan rumah untuk operasi PBB tanpa hambatan dan kebebasan dalam menjalankan operasi.
- f. Terdapat dukungan dari negara-negara tetangga dan aktor regional.
- g. Pendekatan PBB yang terintegrasi, koordinasi yang efektif dengan aktor lain di lapangan dan komunikasi yang baik dengan otoritas dan penduduk negara tuan rumah. (United Nations, 2017).

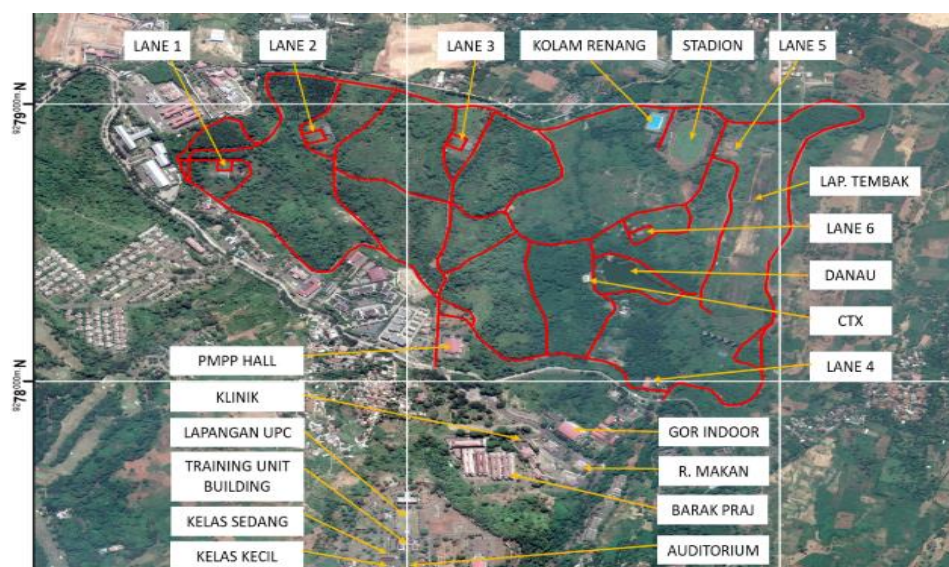
Strategi penyiapan pasukan siaga operasi dalam *PDT* disesuaikan dengan Piagam PBB, pedoman Standar Operasi dan Prosedur untuk PKO, serial video instruksional untuk pelatihan perdamaian, informasi tentang resolusi Dewan Keamanan PBB dan mandat untuk misi pemeliharaan perdamaian, tugas untuk pasukan pemelihara perdamaian serta informasi terbaru tentang daerah misi yang dilaksanakan secara paralel (bersama-sama) di PMPP TNI yang memiliki fasilitas akomodasi untuk para pelatih dan peserta *PDT*, kelas besar dan kelas kecil dengan fasilitas proyektor untuk transparansi dan video, komunikasi dan fasilitas pengajaran bahasa, akses ke daerah latihan utama yang menyerupai daerah misi, pos pemeriksaan dan pos pengamatan, simulasi ranjau latihan dan latihan mengemudi jarak jauh di *Driving Skill Area*, serta latihan menembak dengan menggunakan peluru tajam yang dilaksanakan di lapangan tembak PMPP TNI.

Dalam periode awal hingga sekarang ini, pelibatan TNI dalam *OPPD* PBB tentu saja tidak selalu berjalan baik. Dari jatuhnya korban, kendala di lapangan hingga keberhasilan di daerah misi telah dan akan terus mewarnai perjalanan TNI dalam

OPPD. Hal ini tidak terlepas dari penyiapan Satuan Tugas TNI yang notabene menjadi langkah awal yang layak diprioritaskan, sehingga perlu dioptimalkan.

Pelibatan TNI pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (*OPPD*) dipengaruhi oleh perkembangan situasi di daerah misi yang semakin kompleks dan multidimensional. Kondisi ini menuntut PBB untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan yang dirasa perlu pada aturan-aturan yang mengatur pelibatan personel militer, termasuk TNI. Di samping itu, dinamika di daerah penugasan baik yang pada level taktis/teknis, operasional maupun strategis kerap dihadapi oleh satuan dan personel TNI.

Hal tersebut berimplikasi pada penyiapan Satuan Tugas TNI yang akan diberangkatkan ke daerah misi yang dari masa ke masa juga mengalami penyesuaian yang dirasa perlu. Penyiapan Satuan Tugas TNI tentu saja akan sangat mempengaruhi keberhasilan tugas di daerah misi.

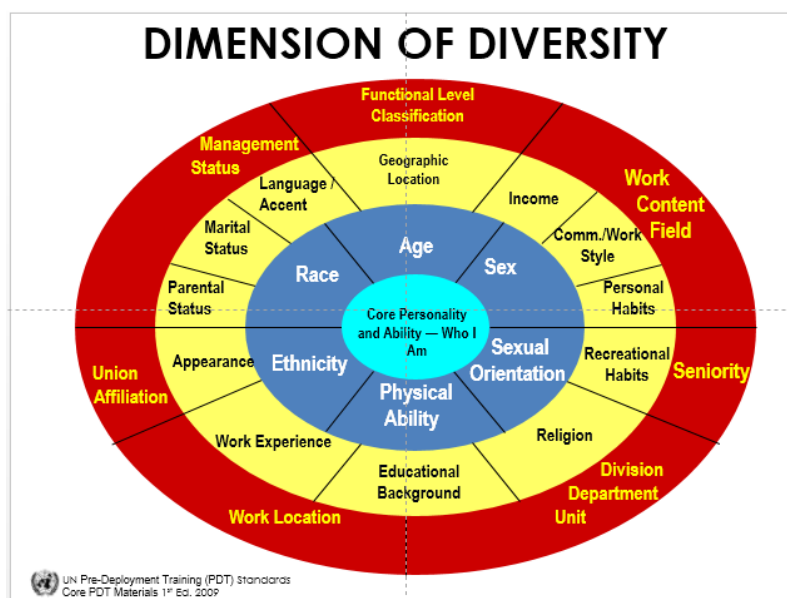


Gambar 2 Sarpraslat PMPP TNI

Sumber: PMPP TNI

Dinamika di daerah penugasan baik yang pada level taktis/teknis, operasional maupun strategis kerap dihadapi oleh satuan dan personel TNI. Hal tersebut berimplikasi pada penyiapan Satuan Tugas TNI yang akan diberangkatkan ke daerah misi yang dari masa ke masa juga mengalami penyesuaian yang dirasa perlu.

Pembentukan strategi dalam penyiapan pasukan siaga operasi dalam *PDT* didukung dengan pemberian Materi standar CPTM merupakan panduan dasar bagi Prajurit Satgas yang telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan geostrategis agar personel satgas tersebut memiliki pedoman dalam mengenal dan memahami tugas pokoknya di lingkungan daerah operasi yang bersifat multidimensi tersebut. Materi *Culture Awareness* dan *Respect for Diversity* yang membahas tentang bagaimana Prajurit Kontingen Garuda dalam berkomunikasi, bersikap dan berperilaku serta menghargai keberagaman yang ada yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun dimensi keberagaman ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 4 Dimensi Keberagaman

Sumber : UN Pre Deployment Training Standart CPTM 2009

Interpretasi data dalam penelitian ini strategi penyiapan pasukan siaga operasi oleh TNI dengan *Pre Deployment Training* masuk dalam strategi mencapai kepentingan nasional Indonesia disesuaikan dari aspek politik luar negeri Indonesia dan upaya Indonesia untuk menjadikan TNI yang profesionalitas.

4. Pembahasan



Kendala Dalam Mewujudkan Strategi Penyiapan Pasukan Siaga Operasi (Standby Force) TNI Dalam Mendukung Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia terlihat minimnya kemampuan mengoperasikan komputer seperti *microsoft office* baik operator maupun non operator harus dikuasai sesuai standar. Ketiga materi tersebut bagi non kontingen sebelum deployment akan dilaksanakan tes pada saat induction training bagi personel sudah berada di daerah misi, tak jarang ada personel yang tidak lulus dalam materi tersebut serta pembekalan bahasa seperti Bahasa arab, komunikasi bahasa asing terutama paling dasar bahasa inggris dan masih adanya personel misi yang direpatriasi ke Indonesia karena faktor kesehatan. Dari hasil seleksi masih banyak yang tidak memenuhi syarat kelulusan karena tidak mencapai nilai minimum kelulusan dan mengenai kualitas personel berdasarkan hasil seleksi dikemukakan bahwa kualitas dari peserta sangat bervariasi, ada yang sudah bagus memenuhi seluruh persyaratan tetapi ada masih jauh dari pemenuhan kuota *peacekeepers*. Hasil seleksi memang belum bisa 100 persen untuk mendapatkan hasil optimal sesuai standar

Permasalahan operasional yang dikaitkan dengan operasi *peacekeeping* menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Akan tetapi, partisipasi dalam *peacekeeping* pada hakekatnya adalah "*costly business*". Mempertahankan pasukan dalam *peace missions* menimbulkan beban finansial yang besar sekaligus tantangan. Kekurangan anggaran dapat mengganggu perencanaan militer, karena anggaran harus disiapkan di luar anggaran utama yang ada, mengingat tidak terdapat anggaran tambahan yang disediakan untuk peran sekunder dari TNI dalam *peacekeeping*. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam menyiapkan pasukan siaga operasi bagi *peacekeeping* dan negara kontributor. Mempertahankan pasukan dalam *peace missions* menimbulkan beban finansial yang besar karena menggunakan APBN.

Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kecenderungan *secondary functions of the Armed Forces/Police*", dimana tidak terdapat struktur khusus, pelatihan maupun tambahan anggaran yang disediakan sebagai bagian dari strategi penyiapan pasukan siaga operasi. Kendala anggaran berkenaan dengan Minimum Essential Force (MEF)



dan ketersediaan anggaran pertahanan di bawah 1% GDP dalam 10 tahun terakhir sangat berdampak pada kualitas SDM standby force.

Juga berdampak pada pertahanan Indonesia, namun juga tugas TNI dalam misi *peacekeeping*. Ini berdampak bahwa anggaran pertahanan secara umum juga akan berkaitan dengan misi-misi *peacekeeping*. Sebagai bagian dari kepentingan nasional, partisipasi pada misi *peacekeeping* memerlukan kesiapan pada sektor pertahanan juga pada dekade yang akan datang.

Masalah pendanaan (*funding*) menjadi hal penting dalam menentukan keberlangsungan operasi perdamaian. Bahwa kontribusi finansial dari negara-negara anggota bagi kesuksesan *peacekeeping operation* PBB sangatlah penting. Pendapat negara negara kontributor lain, selain negara penyumbang pasukan, mengenai permasalahan finansial dan konflik yang dihadapi oleh *peacekeeping operation* yang berjalan juga penting sifatnya, hal ini berpengaruh dalam penyiapan pasukan melalui *PDT*, sehingga diturunkan kepada satuan TNI baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebagai upaya penghematan anggaran bahwa pelatihan dilaksanakan contohnya pada satuan tiap matra yang terpilih berangkat dalam satu batalyon sebagai *main body*.

Dari sisi kapabilitas yang menjadi kendala secara garis besar ada tiga pokok permasalahan yang teridentifikasi. Persoalan pertama adalah belum terpenuhinya standar kemampuan prajurit TNI sesuai tuntutan tugas di daerah misi; kedua, belum efektifnya sistem dukungan dalam menyiapkan Satuan Tugas TNI; ketiga berkaitan dengan pengintegrasian latihan penyiapan dengan lembaga terkait.

Namun fakta di lapangan bahwa pemahaman dalam berbahasa lokal atau internasional (Inggris) secara teknis dirasa menjadi kendala dalam melakukan komunikasi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan kosakata dan kalimat-kalimat dalam bahasa lokal atau internasional. Tentunya pemahaman ini akan sedikit banyak berpengaruh dalam interaksi antara personel Satgas Garuda dengan masyarakat ataupun dengan personel pasukan negara lain. Hambatan bahasa, hambatan prosedur operasi, dan pengetahuan global lainnya. Simpul hambatan dari personel Satgas Garuda tidak terlepas dari kemampuan berkomunikasi yang baik dan



efektif. Komunikasi yang tidak baik dan efektif sedikit banyak menghambat dari komunikasi dua arah dari personel baik dengan masyarakat dari negara penugasan atau pihak lainnya. Sehingga tidak jarang ditemukan pesan yang disampaikan oleh kedua belah pihak baik antara personel Satgas Garuda terjadi *misunderstanding*/ salah pengertian dalam berkomunikasi.

Pada analisis data yang dilakukan dari strategi penyiapan pasukan siaga operasi, masih terdapat faktor kendala dalam pasukan siaga operasi, yaitu dalam aspek kesiapan dimana kesiapan ini merupakan suatu kondisi yang mencakup beberapa aspek yaitu: kondisi fisik, mental, dan emosional, kebutuhan atau motif tujuan, keterampilan dan pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pembinaan materi *OPPD* kepada pasukan siaga operasi terhadap kesiapan pasukan siaga operasi dalam menghadapi penugasan Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

Penyiapan pasukan siaga operasi ditemukan gap antara *real world* dengan sistem strategi yang ada yaitu bahwa belum optimalnya pelaksanaan *Pre Deployment Training* secara keseluruhan karena alokasi anggaran. Maka langkah awal penyiapan Satuan Tugas TNI adalah melalui tahap perencanaan dengan penentuan sasaran, strategi, dan diikuti dengan tolok ukur keberhasilan. Optimalnya pelaksanaan tugas *OPPD*, dapat diukur dari minimnya kerugian personel, moril prajurit, dan nama baik TNI di medan tugas. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya sasaran dan strategi yang telah tercantum dalam doktrin atau regulasi terkait.

Kemampuan personel menjadi salah satu kunci keberhasilan penugasan *OPPD*. Salah satu diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis yang notabene menggunakan bahasa asing, terutama bagi penugasan yang bersifat individu. Penerapan komunikasi menggunakan bahasa asing terutama Bahasa Inggris dalam proses penyiapan akan mempengaruhi kualitas bidang ini. *PDT* yang diselenggarakan bagi penugasan individu masih menggunakan 10% Bahasa Inggris dalam penyampaian materi ataupun pelaksanaan latihan. Dimana angka ini masih kurang ideal untuk mencapai hasil yang optimal di daerah penugasan. Selain itu,



Kursus Bahasa Asing bagi personel yang akan diberangkatkan ke daerah misi (KIBA PKO) telah dihapus sebagai akibat dari *refocusing* alokasi anggaran pandemi Covid-19. Kebijakan ini juga tentu saja mempengaruhi kualitas personel di bidang komunikasi.

Hal ini mengidentifikasi bahwa sistem dukungan penyiapan Satuan Tugas TNI belum efektif, latihan penyiapan Satuan Tugas TNI dengan lembaga terkait belum terintegrasi, standar kemampuan prajurit TNI belum terpenuhi sesuai tuntutan tugas di daerah misi, yang menjadi faktor kendala dalam penyiapan pasukan siaga operasi melalui *Pre Deployment Training*.

Analisis penelitian dilaksanakan dengan menggunakan landasan teori yaitu dengan rumusan strategi yang terdiri dari *ends, means, ways*. *Ends* disesuaikan pada strategi TNI demi mencapai kepentingan nasional masih terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan *PDT*, *ways* yaitu cara-cara yang dilakukan dalam *PDT* belum optimal, sedangkan untuk *means* yaitu sumber daya dari sisi personel, prasarana dalam menunjang pelaksanaan *PDT* masih sepenuhnya stabil mencapai 100% sehingga masih menimbulkan kendala baik pada saat *PDT* bagi pasukan siaga operasi tetapi juga pada saat pasukan melaksanakan *OPPD*.

Belum terpenuhinya standar kemampuan prajurit TNI sesuai tuntutan tugas di daerah misi. Dalam permasalahan standar kemampuan prajurit TNI, maka sub-persoalan pertama yang terjadi adalah kemampuan prajurit dalam berkomunikasi di daerah misi belum optimal dihadapkan dengan masih minimnya kesempatan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan pada proses penyiapan.

Sub-persoalan kedua, yaitu pemahaman prajurit tentang situasi daerah misi pada saat masa penyiapan belum optimal sebagai akibat regulasi pemerataan kesejahteraan dalam pengiriman personel pada *OPPD*. Sub-persoalan ketiga adalah adanya *missing-link* pada proses evaluasi, dimana eksekusi dari *lesson learned* personal dan/atau satuan yang purna tugas belum terlaksana secara optimal.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui pembangunan Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) Sentul dalam prioritasnya pada kapasitas



untuk memberikan kontribusi *civilian component* bagi sebuah misi *peacekeeping* multidimensi. *Peacekeeping operation* menjadi salah satu instrumen yang penting bagi kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia aktif memberikan kontribusi pengembangan konsep strategis penggelaran *UN peacekeeping mission*.

Pembentukan PMPP TNI ini sebagai wujud tindakan nyata bahwa Bangsa Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia sebagaimana seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini sejalan dengan prinsip bentuk diplomasi dalam meningkatkan citra Indonesia secara keseluruhan serta berdampak positif bagi lingkungan internal TNI.

Karena menumbuhkan profesionalisme di lingkungan TNI, menaikkan citra TNI di mata dunia serta dalam upaya diplomasi pertahanan (*defence diplomacy*) secara khusus. Sehingga strategi dalam penyiapan pasukan siaga operasi dalam pelaksanaan *Pre Deployment Training* adalah hal mutlak dan perlu dukungan dari berbagai organisasi di bawah Mabes TNI.

Strategi dalam menyiapkan pasukan siaga operasi tidak terlepas dari *Mission Composition*, merupakan hal yang penting karena dapat mengurangi kekerasan dalam konflik, terdapat dua komposisi penting dalam misi PBB, yaitu kapasitas dan konstitusi. Kapasitas mengacu pada jumlah pasukan, sedangkan konstitusi merupakan jenis pasukan yang akan ditugaskan dalam *peacekeeping* seperti *UN Troops, UN Police dan UN Observer*. Kedua hal ini merupakan aspek terpenting dalam tingkat keberhasilan operasi *peacekeeping*, karena kekerasan dapat berkurang jika operasi PBB memiliki kapasitas dan konstitusi yang sesuai.

Strategi yang dilakukan Indonesia melalui penyiapan pasukan siaga operasi disesuaikan dengan kepentingan nasional melalui lingkup diplomasi pertahanan, sebagai *confidence building measures*. Diplomasi pertahanan yang dilakukan tersebut untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan.

Melaksanakan strategi dalam penyiapan pasukan sebagai upaya menuju salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh kualitas dan



kemampuan satuan itu sendiri baik kemampuan teknik maupun taktik yang dimilikinya. Untuk dapat memiliki kemampuan satuan yang efektif, maka pembinaan latihan harus dilaksanakan secara terus menerus dan sesuai dengan manajemen latihan yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut.

Kepentingan nasional Indonesia memainkan peran penting dalam partisipasi pada misi-misi perdamaian. Hubungan antara kepentingan nasional dan partisipasi pada misi perdamaian harus dijelaskan dalam *White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission*. Pada prinsipnya fungsi PBB dalam piagam PBB dengan mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan internasional dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia yang akan berdampak positif dimana kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional.

PMPP TNI mewujudkan strateginya melalui perencanaan, penyiapan dan pelatihan terhadap pasukan pemeliharaan perdamaian sebelum di *deploy* ke daerah misi yang penuh ketidakpastian dan dinamis. Strategi tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan *Pre Deployment Training* yang dapat diartikan sebagai pelatihan bagi para calon *Peacekeepers* mengenai aturan dan tata cara pelibatan serta penanganan terhadap suatu persoalan dalam melaksanakan tugas daerah misi yang ditentukan oleh PBB. Para calon *Peacekeepers* selama melaksanakan *Pre Deployment Training* akan menerima materi-materi yang telah ditetapkan oleh PBB yaitu *Core Pre-Deployment Training Material (CPTM)*.

Analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan determinan teori strategi yang memiliki 6 aspek/ komponen adalah sebagai berikut; Pertama aspek Tujuan dan sasaran (*organization goals* dan *organizational objectives*), diketahui bahwa TNI dalam penyiapan pasukan siaga operasi merupakan bagian dari perwujudan profesionalitas TNI dimana para pemimpin selalu menyampaikan bahwa tugas *OPPD*



adalah kesempatan besar untuk mengembangkan kapabilitas personel dan menunjang kesejahteraan personel, dalam lingkup yang lebih luas yaitu menjamin kepentingan nasional melalui hubungan internasional yaitu partisipasi Indonesia dapat menjamin kredibilitas Indonesia melalui aspek militer sehingga hal ini menimbulkan *power* tersendiri bagi Indonesia tidak hanya di PBB tetapi di lingkup internasional.

Aspek kedua, Lingkungan yaitu dalam sisi internal TNI strategi terdukung melalui keputusan dan kebijakan oleh TNI seperti dukungan pemerintah membentuk PMPP TNI dan penyiapan melalui *Pre Deployment Training* adalah upaya agar pasukan siaga operasi dapat berhasil melaksanakan tugas. Aspek ketiga, kemampuan internal dikaitkan dengan strategi apabila dari faktor internal dikatakan mampu yaitu TNI sebagai pelaksana kegiatan maka strategi akan berjalan meskipun belum dapat dikatakan optimal karena masih ditemukan beberapa kendala.

Aspek keempat, strategi merupakan bagian dari kompetisi. Sesuai dengan hasil penelitian ini dimana apabila dikaitkan dengan kepentingan nasional semua Negara (*TCC*) dapat berkontribusi mengirimkan personelnnya sehingga menjadikan adanya kompetisi diantara *TCC*, khususnya kepentingan nasional Indonesia disesuaikan dengan visi mencapai *4000 peacekeepers*. Kompetisi ini memberikan peluang yang bermanfaat bagi Negara dan TNI, dikembangkan juga sebagai sarana Negara untuk menggunakan kemampuan personel TNI serta sampai pada kekuatan Industri pertahanan yang dapat digunakan di Negara misi. Aspek kelima pembuat strategi, dalam tataran kebijakan Negara, mulai dari Presiden, para Menteri yang berwenang dalam penyiapan pasukan siaga operasi yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri yang tergabung dalam TKMPP, serta Panglima TNI merupakan aktor -aktor yang berwenang dalam membuat strategi.

Aspek keenam yaitu komunikasi, strategi yang dibuat dan dijalankan didukung dengan komunikasi. Komunikasi merupakan alat yang digunakan baik secara dua arah dan multiple, karena apabila pelaksanaan strategi tidak memahami apa yang direncanakan maka strategi tidak akan berhasil. Pada penelitian ini komunikasi yang



dibangun antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus terjalin dengan baik agar penyiapan pasukan siaga operasi melalui *Pre Deployment Training* dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

Strategi dengan menggunakan *Pre Deployment Training* merupakan Pelatihan pemeliharaan perdamaian yang bersifat umum, terspesialisasi dan sesuai situasi daerah misi yang didasarkan pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berlangsung sebelum penempatan sebenarnya ke misi PBB. Sesuai dengan pasal I ayat 9 undang-undang No.13 Tahun 2003 pelatihan tersebut diartikan sebagai pelatihan kerja adalah yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan materi-materi yang telah ditetapkan oleh PBB yaitu *Core Pre-Deployment Training Material (CPTM)*.

Latihan yang dilakukan sebagai strategi yang disiapkan antara lain ; *Green material* adalah kemampuan dasar militer dan kemampuan kecabangan zeni yang sudah ada. Dan *blue material* merupakan kemampuan dasar tentang operasi pemeliharaan perdamaian dunia yg dipersyaratkan oleh PBB dan yang harus dipunyai oleh para *peacekeepers*. Diperlukan penyesuaian terhadap berbagai kondisi alam di Indonesia mengingat beratnya tantangan medan dan cuaca yang akan dihadapi para *peacekeepers* di daerah operasi.

Sehingga, suatu kekuatan militer dikatakan efektif penuh (*fully effective*) apabila mampu mengelola secara maksimal segala sumber daya yang tersedia baginya ke dalam kekuatan tempur nyata yang didukung dengan strategi terwujudnya penyiapan Satuan Tugas TNI melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prajurit TNI sebagai *peacekeeper* profesional guna menghadapi tantangan dan tuntutan tugas di daerah misi, pemenuhan sistem dukungan yang efektif, serta pengintegrasian penyiapan Satuan Tugas TNI dengan komponen lainnya guna melaksanakan Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia untuk mendukung Tugas Pokok TNI..



Strategi harus bersifat komprehensif, mengandung arah yang jelas, bertujuan mengendalikan, dan pada dasarnya memusatkan perhatian pada penggunaan sebuah kekuatan. Secara ringkas, strategi mengandung arti bagaimana (*ways*) kepemimpinan menggunakan kekuatan /sumber daya (*means*) untuk mengendalikan pengaruh lingkungan yang ada di sekelilingnya, dalam rangka mencapai tujuan (*ends*) yakni dengan mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas prajurit sebagai *peacekeepers* profesional guna menghadapi tantangan dan tuntutan tugas di daerah misi, melalui meningkatkan kemampuan prajurit dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing dan bahasa setempat di daerah misi, meningkatkan pemahaman prajurit tentang situasi daerah misi, dan mengoptimalkan proses evaluasi agar berjalan secara transparan, efektif, dan berkesinambungan dengan metode pelaporan, pengkajian, koordinasi, instruksi, penyusunan, penerbitan, evaluasi, pengusulan, diskusi, revisi, pengesahan, sosialisasi, pelatihan, latihan, pendidikan, seminar, dan kerja-sama menggunakan sarana legislasi berupa Peraturan Panglima, Peraturan Kas Angkatan, Surat Perintah, doktrin, prosedur tetap, produk seminar, kalender latihan, ROE (*Rule of Engagement*), SOP (*Standard Operating Procedure*), *Code of Conduct*, dan dokumen PBB lainnya dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas prajurit TNI sebagai *peacekeepers* profesional yang mampu melaksanakan *OPPD*. Peningkatan pemahaman prajurit tentang situasi di daerah misi berkaitan erat dengan latihan pratugas *OPPD* (*PDT*) yang dilaksanakan sebelum masa siaga operasi, dan *in-mission training* yang dilaksanakan saat tiba di daerah misi.

Upaya Berdasarkan Strategi , yakni mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas prajurit sebagai *peacekeeper* profesional guna menghadapi tantangan dan tuntutan tugas di daerah misi, melalui peningkatan kemampuan prajurit dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing dan bahasa setempat di daerah misi, peningkatan pemahaman prajurit tentang situasi daerah misi, dan pengoptimalan proses evaluasi agar berjalan secara transparan, efektif, dan berkesinambungan dengan metode pelaporan, pengkajian, koordinasi, instruksi, penyusunan, penerbitan, evaluasi, pengusulan, diskusi, revisi, pengesahan, sosialisasi, pelatihan, latihan,



pendidikan, seminar, dan kerja-sama menggunakan sarana legislasi berupa Peraturan Panglima, Peraturan Kas Angkatan, Surat Perintah, doktrin, prosedur tetap, bahan paparan, produk seminar, kalender latihan, ROE (*Rule of Engagement*), SOP (*Standard Operating Procedure*), *Code of Conduct*, dan dokumen PBB lainnya dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas prajurit sebagai *peacekeepers* profesional yang mampu melaksanakan *OPPD*.

5. Kesimpulan

Masih terdapat kendala yang ditemukan dalam mewujudkan strategi penyiapan pasukan siaga operasi dalam *OPPD* mewujudkan keberhasilan operasi misi pemeliharaan perdamaian dunia, yaitu dengan adanya permasalahan terbatasnya anggaran yang mengakibatkan pergeseran pada tempat latihan yang semula terpusat di PMPP TNI menjadi tersebar dilaksanakan di Kotama/Kodam dimana satuan main body berada. Hal tersebut berdampak pada strategi yang telah ditetapkan yaitu tidak efektifnya latihan dikarenakan minimnya pemenuhan sarana dan prasarana di basis satuan tersebut, berimplikasi pada kemampuan pasukan, terutama dalam pelaksanaan tugas. Hal ini diketahui dari terbatasnya anggaran yang dimiliki karena bersumber dari APBN dan perlu disesuaikan dengan kekuatan anggaran Negara.

Permasalahan pasukan dengan keterbatasan dari segi komunikasi bahasa kemampuan prajurit TNI yang dikirimkan ke daerah penugasan *OPPD* yang menjadi modal utama dalam berkomunikasi. Pelaksanaan latihan tidak optimal dengan waktu terbatas dan prasarana terbatas. Dari materi diberikan namun untuk praktek kurang optimal.

Selain itu, perubahan kebijakan ini belum didukung dengan adanya doktrin dan regulasi. Strategi yang dilakukan TNI sejalan dengan pengertian konsep strategi yang terdiri dari unsur-unsur *means, ways dan ends*. *Ways nya* didukung dengan kebijakan dan peraturan yang sudah dibuat dari PBB, Pemerintah Indonesia, sampai pada Panglima TNI. *Means* dari strategi ini yaitu sarana dan prasarana yaitu dengan lokasi Latihan yaitu di PMPP TNI, materi-materi yang diberikan sesuai dengan mandat PBB



agar pasukan dapat menjalankan tugas dengan berhasil sumber daya manusia yang dimiliki TNI. *Ends* dari strategi ini yaitu untuk TNI sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dapat mengembangkan kemampuan setiap personel yang melaksanakan *OPPD* serta sejalan dengan kepentingan nasional.

Daftar Pustaka

- Baylis, John. 2016. *Strategy in The Contemporary World*. Oxford: Oxford University Press
- Creswell, John W.(2019). *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Genugten, W.J.M. van, C. Homan, N.J. Schrijver, P.J.I.M de Waart. 2006. "*Peace-Keeping and Peace-Enforcing Operations*" in *The United Nations of the Future Globalization with A Human Face*. Amsterdam: KIT Publishers
- Halkis, Mhd, 2020, Ethics of Defense Diplomacy in Constellation Post National, The International Journal of Business & Management, Vol 8 Issue 3, Doi:10.24940/theijbm/2020/v8/i3/BM2003-061,
- Lykke, Arthur F. Jr. 200). *Toward An Understanding Of Military Strategy*.
- U.S. Army War College Guide To Strategy. Carlisle: U S Army War College.
- Miles, M., & Huberman, A. (2018). *Qualitative data analysis, A methods sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications
- Thakur, Ramesh & Albrecht Schnabel, eds. 2001. *United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement*. New York: The United Nations University Press
- UN Reference Book Core Pre-Deployment Training Materials (CPTM)*. (2011)
- Peace Operation Training Institute. (2016). *Civil-Military Coordination in Peace Operations*. Retrieved from <https://www.peaceopstraining.org/courses/civil-military-coordination-peace-operations/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
- Peraturan Panglima TNI Nomor 60 tahun 2017 tentang Penugasan Prajurit TNI pada *OPPD*



Peraturan Panglima TNI Nomor 73 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas PMPP
TNI

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/906/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan TNI pada *OPPD*

The United Nations. (1996). *Principles for the Conduct of Peace Support Operations (PSO)*
Programme of Instruction in Peace-keeping

The United Nations. (1996). *Secretary General's Initiative on Action for Peacekeeping (A4P)*

The United Nations. (1997). *United Nations Peacekeeping Operations, Special Political
Missions and Other Political Presences*

Deni Muhtarudin, Operasi Perdamaian PBB Langkah Komprehensif Mencegah
Konflik, [https://akurat.co/operasi-perdamaian-pbb-langkah-komprehensif-
mencegah-konflik](https://akurat.co/operasi-perdamaian-pbb-langkah-komprehensif-mencegah-konflik)

Horton, Mark. Ends, Means, Ways – Simplifying Strategy,
[https://engage2perform.co.uk/
2020/12/06/ends-means-ways-simplifying-
strategy/](https://engage2perform.co.uk/2020/12/06/ends-means-ways-simplifying-strategy/)

Peace Operation Training Institute, Civil-Military Coordination in Peace Operations,
[https://www.peaceopstraining.org/courses/civil-military-coordination-peace-
operations/](https://www.peaceopstraining.org/courses/civil-military-coordination-peace-operations/)